



YAK/PARPEM
Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

SORA KEKELENGEN EDISI XXVI-2025

JL. JAMIN GINTING KM 45 DESA SUKAMAKMUR
KECAMATAN SIBOLANGIT
KAB. DELI SERDANG
20357 SUMATERA UTARA
INDONESIA

UNTUK KALANGAN SENDIRI



Yayasan Ate Keleng GBKP



Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP



Yayasan Ate Keleng GBKP



Yakparpembgkp

Tim Redaksi

Penanggung Jawab -

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

Redaksi Pelaksana -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Design Graphics / Editor -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Distributor & Kontributor -

Rupina Br Purba, S.PAK
Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd
Indah Permatasari Br Tarigan, S.Sos
Eninta Barus, S.Sos
Vionna Clarissa Br Ginting, S.H
Guntur Tarigan
Silvia Agnes Yolani, SPt
Windi Karolina Yoanita, SE
Selly Evianta, SM

- Pemimpin Redaksi

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

- Staf Redaksi

Lesmawati Br Perangin-Angin, Amd
Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP
Corry Anggreyny br Ginting, S.Hut
Jenni Efrida Br Sembiring, S.Pd
Lasendri Br Tumanggor
Esterina Br Tarigan
Abdi Tarigan
Lestari Br Sitepu, SE
Yuni Sartika Ginting, SE

- Keuangan

Dea Dwinta Putri Br Bangun, SE
Egia Nina Veronika, Amd
Priska Tarigan, S.Kom

Ir. Leader Suriawan Tarigan
Adi Anggraha Tarigan, S.Hut
Timotius Natanael Perangin-angin,S.Hut
Sriulina Br Sembiring, S.Tr.P
Setia Budi Sembiring
Kaisar Tarigan
Armin Ginting
Jusmiaty Br Tarigan

Alamat Redaksi

Jl. Jamin Ginting Km. 45 Desa Sukamakmur, Kecamatan
Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 20357 Sumatera Utara
Indonesia

 (0628) 97267 |  0821 6555 2744

BERITA REDAKSI

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si,Theol.,MADM.

(Direktur Eksekutif YAK/Parpem GBKP)

Salam Sejahtera bagi seluruh pembaca Sora Kekelengen yang setia, Syukur yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas ijinNya kita masih memiliki kesempatan hidup dan melayani sampai saat ini di Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP dan di bidang kerja pelayanan kita masing-masing. Melalui meja redaksi, kami menyapa seluruh pembaca yang setia dengan hangat dan semoga para pemcaba semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta selalu ada spirit membaca karya tulisan-tulisan yang ada pada *infosheet*/buletin Sora Kekelengen kita ini .

Ada delapan karya tulisan dari tim penulis kita di edisi ke XXVI kali ini. Tim penulis yang selalu setia menuangkan pengalaman dan kapasitas menulisnya yang diperoleh dari pelayanan pemberdayaan di tengah masyarakat dampingan dari bidang keuangan, lingkungan, ekonomi dan sosial politik. Tulisann-tulisan artikel yang kami sajikan selalu dan selalu seputar tema kerja-kerja pelayanan pemberdayaan masyarakat oleh YAK/Parpem GBKP. Karya tulisan-tulisan tersebut adalah tentang keberlanjutan sumber daya alam, *Batang Kayu kap Kesah, Kerangen kap Kegeluhen* (Pohon adalah nafas, hutan adalah kehidupan), tentang pentingnya kita memperjuangkan ketahanan hutan. Disini juga diberitakan tentang Hari Pohon Sedunia, pentingnya kehadiran Hutan dan Inovasi. Selanjutnya ada tulisan tentang berita terkini seputar *UP YAK* (Unit PAMOR YAK) yang sudah terbentuk secara resmi pada 4

November 2024 lalu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung PAMOR YAK dimasa depan. Tulisan lainnya tentang Bertani Sehat untuk Bumiku Selamat, ini adalah pemahaman dan kesadaran untuk pentingnya bertani sehat secara organik tanpa pemakaian pestisida kimia. Tulisan selanjutnya tentang *Women Support Women* (Perempuan Mendukung Perempuan), artinya salah satu kekuatan penting bagi perempuan adalah jika ia didukung oleh sesamanya perempuan dengan bersama memiliki tujuan perjuangan dan semangat yang sama dalam memimpin dan membawa kebijakan bagi masa depan para perempuan di masyarakat. Tulisan lainnya adalah tentang Peraturan Desa sebagai Landasan Hukum di dalam Pembangunan Desa, hal ini berkaitan tentang semangat menciptakan peraturan di desa untuk mencapai kemajuan dan pembangunan seluruh warga desa untuk pencapaian tujuan tertentu. Khususnya pembangunan juga terakomodir bagi semua kelompok rentan di desa (perempuan, lansia, anak, korban konflik, odha dan penyandang disabilitas). Tulisan yang relate juga adalah tentang Hak Asasi Manusia untuk Pembela HAM, menjadi penting untuk dipahami dan disharekan dalam buletin ini bagi kita sekalian dalam menghadapi tantangan dalam memperjuangkan HAM di masyarakat. Buletin ini diakhiri dengan tulisan *Human Capital Theory*, tentang kapasitas yang ada pada manusia dalam meningkatkan dan memajukan dirinya/produktivitasnya, potensinya dan kompetensinya adalah modal besar bagi manusia itu dan modal yang berharga bagi setiap manusia sekarang dan di masa depan jika modal itu dilihat, diasah dan disadari serta dilatih akan menjadi keterampilan yang luar biasa.

Melalui semua tulisan artikel yang sudah ada pada edisi ke XXVI ini, kiranya dapat menambah kekuatan, komitmen, kesetiaan, ilmu, informasi, pemahaman yang kuat dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat dari berbagai bidang yang dikerjakan oleh YAK/Parpem GBKP. Semoga peran dan kerja kita bersama dalam meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, sosial politik, ekonomi dan bidang lainnya bagi masyarakat semakin baik, berdampak dan berkelanjutan tetap hidup pada masyarakat dampingan dan diluar dampingan YAK GBKP. Akhir kata kami berterimakasih bagi seluruh tim Sora kekelengen dan seluruh pembaca yang setia.

Kami juga berharap agar pembaca Sora Kekelengen mengunjungi website YAK/Parem GBKP di www.yakparpem.org. Facebook di YayasanAteKeleng/PARPEMGBKP dan IG di YayasanAteKelengGBKP. Di sana Anda sekalian bisa mendapatkan edisi-edisi lampau, ikut serta dalam diskusi, bahkan berlangganan dan membaca beberapa artikel yang khusus diterbitkan di media online ini. Jika Anda mempunyai masukan, pertanyaan, artikel, ataupun resensi buku, Anda bisa mengirimkannya ke redaksi ke atekelengfoundation@yakparpem.org.

Demikianlah penghantar Sora Kekelengen dengan sangat bangga kami sampaikan terimakasih, Tuhan Yesus Kristus beserta kita dan memberkati kita sekalian. Terimakasih.

kebutuhan pribadi. Penebangan pohon menjadi salah satu kegiatan yang setiap tahun ada di negara Indonesia untuk peningkatan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Badan Geospasial (BIG) tahun 2024 Indonesia masih memiliki target Kawasan hutan seluas 19,9 juta hectare tahun 2023 yang mana Indonesia masih memiliki luas hutan sebesar 102,53 hektare.

Target Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023 dan PP No.23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menetapkan target Kawasan hutan di Indonesia sebesar 125,77 juta hectare. Target 19,9 hektare bukan merupakan target yang sedikit jika disandingkan dengan target Pembangunan Nasional tahun 2024 dibidang ekonomi sebesar 5,3-5,7% serta penekanan kemiskinan 6,5-7,5% yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan penebangan pohon, pengalihan fungsi hutan untuk lahan lain seperti program pemerintah yaitu food estate dengan output kegiatan Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate tahun 2020 oleh Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu:

- A. Membangun strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape
- B. Perubahan fungsi dan pelepasan Kawasan hutan
- C. Penataan Batasan hutan

Program pemerintah tentunya memiliki dampak terhadap penggerusan lahan hutan yang mana dalam pembangunan food estate ini sendiri hutan adalah objek utamanya, hutan dialihfungsikan lahannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia jangka panjang, dampak akibat pengalihan fungsi lahan hutan ini tentunya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini berupa kenaikan suhu udara. Secara umum menurut penelitian satu pohon besar menghasilkan sekitar 1,2 kg per hari, menyerap 2,5 ton karbon dioksida/tahun, menyimpan 900 m³ air tanah/tahun, mentransfer 4000 liter per hari, menurunkan suhu 5^o-8^o C, meredam kebisingan 25-80 persen, dan mengurangi kekuatan angin 75-80 persen. Hal ini tentunya secara langsung dapat dirasakan manfaat pohon pada siang hari yang umumnya panas jika dibawah naungan pohon sangat adem dan sejuk, inilah bukti bawah pohon menghasilkan oksigen serta menurunkan suhu.



Dokumentasi Kegiatan Penanaman Pohon Di Kelompok Tani Hutan Derek
22 November 2024

Lalu apa respon kita sebagai masyarakat melihat banyaknya hutan yang dialihfungsikan ? Apakah akan diam ? Merasa itu bukan tanggungjawab kita ataukah masa bodoh dengan kondisi yang terjadi sekarang. Yayasan Ate Keleng GBKP sebagai penerima Kalpataru dari Presiden tahun 1985 memiliki tanggungjawab besar dalam menjaga dan melindungi hutan, YAK mendampingi masyarakat kerjasama dengan donor melakukan pendampingan masyarakat dalam pengaksesan bibit dari Dinas terkait yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Wampu Sei Hutan juga pendampingan pemanfaatan anggaran Ketahanan Pangan Desa untuk penanaman pohon produktif dengan tujuan “jika pohon yang dirawat baik akan menghasilkan nilai ekonomi maka masyarakat tidak akan menebang justru akan merawat dan memeliharanya”. Sebagai respon Yayasan Ate Keleng dalam perayaan Hari Pohon Sedunia tahun 2024 tanggal 21 November yang dilaksanakan di tanggal 22 November 2024 oleh Yayasan Ate Keleng dengan melakukan penanaman pohon tanaman produktif di lahan KTH (Kelompok Tani Hutan) Derek dengan tema Hutan dan Inovasi Hutan Kita, Masa Depan Kita dengan menanam 50 pohon durian musang king dan 50 pohon alpukat miki dengan kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Derek dan melibatkan kurang lebih mahasiswa praktek lapangan Universitas Negeri Medan yang kebetulan saat ini sedang melaksanakan praktek kerja lapangan.



Dokumentasi Kegiatan Penanaman Pohon Di Kelompok Tani Hutan Derek
22 November 2024

Ini adalah salah satu dari banyaknya kegiatan penanaman pohon yang dilakukan dengan harapan bersama-sama menanam bersama-sama merawat. Kecamatan Sibolangit tercatat dalam bulan November 2024 akibat intensitas hujan yang lebat dan dengan durasi yang lama menyebabkan banyaknya terjadi longsor, Desa yang didampingi Yayasan Ate Keleng juga mengalami hal yang sama yaitu Desa Sala Bulan, Desa Buluh Awar, Desa Rumah Kinangkung, Desa Basukum serta Desa Martelu Dusun Cingkam yang mengalami banjir bandang serta Longsor di Jalan Jamin Ginting Sibolangit Sembaha tepatnya di Sepanjang jalan Tirtanadi Sibolangit Sembaha, banyaknya longsor yang terjadi dan memakan korban jiwa. Dan ini adalah bukti nyata bahwa alam kita sudah tidak baik-baik saja, pohon dan hutan kita sudah harus

diperbaiki. Melihat kondisi ini sudah saatnya kita ambil bagian bukan hanya duduk diam. Bersama-sama menjaga lingkungan, melakukan langkah adaptasi dan mitigasi resiko.

Dimulai dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman hias, tanaman obat, tanaman pertanian juga pohon untuk menciptakan kenyamanan dan kualitas udara yang baik bagi penghuni rumah. Mencoba membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sisa sampah dapur rumah tangga untuk menjadi pupuk kompos padat dan cair, ecoenzym, pemanfaatan air limbah beras menjadi Jakaba. Memanfaatkan biji buah untuk ditanam dengan memanfaatkan sampah sebagai pengganti polybag.



Dokumentasi Kegiatan Pemanfaatan Sampah dan Limbah yang dilakukan salah satu Mitra Narasumber Divisi Lingkungan Hidup Terkait Perubahan Iklim dan Pengelolaan Sampah dan Limbah (Rohani Br Simanjorang)

Menanam pohon adalah langkah perbaikan sistem di organ vital bumi, perbaikan sel-sel paru-paru dunia sehingga tercipta kualitas kehidupan yang lebih nyaman, sistem pernafasan yang nyaman serta melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Menanam pohon adalah langkah awal perlindungan keberlangsungan anak cucu kita sebagai generasi emas bangsa ini, 1 pohon besar dapat menyediakan oksigen untuk 4 orang dewasa selama satu tahun lalu berapa banyak pohon yang harus kita tanam untuk menjamin keberlangsungan bernafas dan kehidupan keluarga kita ? Mari bersama-sama melakukan penanaman pohon untuk masa depan kita, hutan kita adalah kehidupan kita, bersama-sama berinovasi menjaga dan melindungi hutan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dan menjamin keberlangsungan hidup manusia untuk anak-anak dan masa depan mereka. “Trees is Breath and Forest is Life”



Dokumentasi Kegiatan Penanaman Pohon Di Kelompok Tani Hutan Derek
22 November 2024

“UP YAK”

Oleh Dini Christ Moriani Br Tarigan

UP YAK adalah singkatan dari kata UNIT PAMOR YAYASAN ATE KELENG. Pada bulan februari 2024, staf Yayasan Ate keleng bersama perwakilan petani dari kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng serta beberapa utusan dari lembaga mitra YAK melakukan pertemuan untuk rencana pembentukan unit pamor untuk petani organik di wilayah dampingan Yayasan Ate Keleng yang didampingi oleh staf dari AOI (Aliansi Organik Indonesia) Bogor. Sebagai hasil tindak lanjut dari kegiatan ini, maka pada 4 November 2024 akhirnya UP YAK resmi terbentuk.

Mungkin istilah PAMOR masih belum dikenal luas. PAMOR Indonesia adalah singkatan kata dari Penjaminan Mutu Organik. PAMOR merupakan sistem penjaminan partisipatif (PGS) dalam pertanian organik yang melibatkan petani atau produsen dengan pihak lain seperti pedagang, konsumen, LSM, dan pemerintah dalam menilai sistem mutu yang sesuai dengan standar organik. Melalui PAMOR diharapkan kelompok dampingan yang sudah memiliki produk organik namun belum memiliki penjaminan dari pihak manapun termasuk penjaminan mutu dari LSO (Lembaga Sertifikasi Organik) karena biaya relative mahal dapat terbantu. Dalam system penjaminan PAMOR, aktor utama adalah produsen sendiri yang terlibat dalam menilai dan mendeklarasikan kesesuaian pretek pertanian organik dengan standar organik.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjaminan bagi pasar lokal hingga nasional dan diprioritaskan bagi kelompok tani



Untuk menambah wawasan dari pengurus UP YAK yang sudah terbentuk, maka pada bulan Desember 2024 sudah dilakukan kunjungan ke UP Serdang Bedagai yang merupakan Unit PAMOR yang didampingi oleh Lembaga BITRA di Serdang Bedagai.

Kelompok UP Serdang Bedagai sudah berdiri selama 8 tahun, dan saat ini produk yang sudah disertifikasi PAMOR adalah produk beras. Berdasarkan pemaparan Bapak Paiman selaku manager Unit PAMOR Serdang Bedagai, bahwa saat ini permintaan beras organik cukup tinggi namun pasokan beras yang dihasilkan masih terbatas. Untuk saat ini konsumen beras organik dari kelompok Serdang bedagai meliputi pegawai kantor BPJS yang memesan 400 kg beras setiap bulan, konsumen dari kantor BMKG dan ada beberapa konsumen dari pihak sekolah.

Sebenarnya konsumen tidak terlalu menuntut adanya sertifikasi organik dari beras yang mereka hasilkan karena konsumen sudah melihat langsung perlakuan yang dilakukan oleh petani di lahan demplot mereka ataupun setelah mendengar informasi dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa beras yang mereka hasilkan memang beras organik.



Foto : Bersama Bapak Ir. H. Soekirman (Mantan Bupati Serdang Bedagai, Mantan Direktur BITRA Indonesia, dan Duta Pertanian Organik ALGOA Asia)

Perlakuan organik yang diterapkan pada tanaman padi meliputi pemberian pupuk organik, pengaturan sistem filterisasi irigasi yang masuk ke sawah menggunakan kolam filtrasi yang ditanami eceng gondok, penyemprotan pestisida alami apabila diperlukan. Dari pengamatan di lahan padi, tidak tampak perbedaan antara tanaman padi organik mereka dengan tanaman padi petani lain yang masih menggunakan sistem konvensional, bahkan diakui bahwa tanaman padi yang saat ini sudah mulai

memasuki fase berbunga belum pernah disemprot sekalipun karena serangan hama penyakit sangat kecil.

Dari pengalaman yang dipaparkan oleh petani dari Unit Pamor Serdang Bedagai, diharapkan dapat menambah wawasan dari pengurus Unit Pamor YAK dan produk dampingan YAK yang sudah memenuhi standar organik dapat memperoleh sertifikat PAMOR sehingga produk petani dampingan YAK akan lebih dikenal di masa depan.



YAK/PARPEM
Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

“Women Support Women”

Oleh Eninta Barus, S.Sos



Perempuan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai sektor meski kemajuan signifikan telah dicapai. Sistem sosial dan ekonomi yang diskriminatif sering menjadi penghalang utama. Ada empat aspek penting dalam memperjuangkan keadilan gender yakni: akses kuasa, partisipasi, kontrol kekuasaan, dan manfaat sosial. Meski akses perempuan di kepemimpinan telah meningkat, kualitas partisipasi mereka perlu ditingkatkan, termasuk di bidang politik, teknologi, dan kesehatan. “Kuota 30 persen di parlemen belum cukup. Kepemimpinan perempuan harus hadir di berbagai sektor

strategis,” keberadaan perempuan di posisi strategis menciptakan keseimbangan dalam pengambilan Keputusan, mengingat banyak kebijakan yang tidak pro terhadap Perempuan. Hanya menjadikan Perempuan sebagai objek dan pelengkap saja tanpa melibatkna secara langsung. Perempuan membawa perspektif yang lebih teliti dan sering kali lebih efektif dalam organisasi yang membutuhkan perhatian detail karena memiliki Tingkat emosi yang lebih tinggi.

Negara-negara maju memberikan insentif seperti cuti melahirkan berbayar dan tunjangan anak. Hal ini juga sudah diterapkan untuk beberapa Perusahaan yang ada di Indonesia hanya saja menyebabkan Perusahaan lebih dominan mengambil pekerja laki-laki dibandingkan Perempuan, hal ini terlihat dalam pengumuman lowongan di beberapa Perusahaan yang menulis dengan jelas untuk dalam surat pengumuman pelamaran dengan tulisan “Imenerima pekerjaan khusus laki-laki atau lebih mengutamakan laki-laki”. Hal ini merupakan diskriminasi yang dialami Perempuan dalam mencari pekerjaan, yang menyebabkan Perempuan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam kerja domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyetarakan antara pekerja laki-laki dan Perempuan.



Affirmative Action yang diberlakukan untuk Perempuan yang tertuang dalam UU No 7 tahun 2017 belum sepenuhnya mendapat dukungan dan bahkan belum banyak diketahui oleh Masyarakat khususnya Perempuan, jika dimanfaatkan hal tersebut adalah peluang untuk Perempuan bisa duduk dalam kursi pemerintahan dan ikut dalam pengambilan Keputusan maupun penyusunan kebijakan. Melihat dari banyaknya kebijakan yang tidak pro Perempuan sangat penting rasanya untuk memiliki perwakilan Perempuan dalam suatu Perusahaan ataupun pemerintahan

Untuk mendukung dan mempersiapkan Perempuan menjadi pemimpin, maka YAK dalam divisi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) membentuk kelompok-kelompok kecil di desa dampingan yang terdiri dari 10 orang Perempuan, kelompok kecil ini diberikan Pendidikan dan

pembekalan mengenai berorganisasi, mengutarakan pendapat dan pandangan dalam musyawarah baik di organisasi kelompok maupun ditingkat desa. Untuk memperkuat hubungan antar kelompok maka YAK membentuk Jaringan Perempuan yang dinamakan dengan JAPE Keleng (Jaringan Perempuan Ate Keleng) yang terdiri dari 2 kabupaten, yakni Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Karo, dengan adanya jaringan Perempuan ini besar harapannya akan melahirkan pemimpin Perempuan. Karena itu YAK melakukan Pendidikan kepemimpinan Perempuan yang diadakan pada tanggal 3 dan 4 desember 2024 yang lalu. Adapun materi yang diibagikan adalah :

1. Gender dan jenis kelamin

Gender bukan lagi hal yang baru didengar oleh Masyarakat namun masih banyak Perempuan yang belum memahami betul perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Pandangan jika Perempuan Tangguh adalah Perempuan yang pintar mencari nafkah, pintar mengurus suami, pintar mengurus anak dan pintar mengurus rumah mengakibatkan Perempuan mengalami peran ganda. Pandangan “Perempuan Tangguh” tersebut juga didukung oleh Perempuan, mereka merasa bangga jika Perempuan mampu melakukan semua hal sendiri dan mandiri sehingga tidak jarang Perempuan mengalami depresi dan mengakibatkan bunuh diri karena banyaknya beban yang mereka emban. Pandangan tersebut harus dirubah untuk mendukung Kesehatan mental maupun jiwa Perempuan.

Bekerja, mengurus anak maupun rumah bukanlah kodrat dari seorang Perempuan..

2. Pelatihan Publik Speaking

Banyak Perempuan yang merasa tidak mampu untuk berbicara di depan umum, mengutarakan pendapat dalam sebuah pertemuan. Pada kenyataannya Perempuan bukan tidak mampu hanya saja belum terbiasa dan terlatih, sifat rendah diri dan menganggap Perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki masih sering muncul di kalangan Perempuan, sehingga sangat penting untuk mengasah rasa percaya diri dari Perempuan, agar Perempuan semakin mampu dan berani dalam mengutarakan pendapat. Berbicara di depan umum tidak membutuhkan keahlian khusus namun dengan berlatih dan membiasakan diri maka Perempuan akan mampu untuk melakukannya.

3. Advokasi Perempuan

Banyak kebijakan yang lahir tidak pro terhadap Perempuan, adanya batasan jenis kelamin dalam pencarian kerja, adanya perbedaan upah yang dialami Perempuan merupakan salah satu diskriminasi yang kerap dialami oleh Perempuan. Untuk mengubah kebijakan tersebut Perempuan sebaiknya masuk dan ikut berkecimpung langsung dalam pengambilan Keputusan dan pembuatan kebijakan. Tidak jarang kebijakan yang muncul kontra terhadap Perempuan karena tidak adanya Perempuan yang terlibat.

4. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menginspirasi, dan memandu orang lain menuju tujuan bersama. Ini tak hanya berkaitan dengan memiliki posisi atau otoritas formal, tetapi juga melibatkan kualitas pribadi yang memungkinkan seseorang untuk membimbing, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok. Pemimpin tidak mengenal jenis kelamin, siapa saja bisa dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin.

Perempuan, cenderung lebih sulit untuk menjadi seorang pemimpin hal ini dikarenakan adanya anggapan masyarakat dan masih kentalnya sistem patriarki yang ada, rendahnya minat perempuan dalam menjadi pemimpin juga berpengaruh. Mereka cenderung menempati posisi yang tidak signifikan atau terbelakang. Hal ini, disebabkan oleh dua faktor inti yaitu:

1. Adanya dikotomi maskulin/feminin dalam peranan manusia akibat dari ketetapan biologis yang seringkali mengakibatkan adanya proses usaha pembatasan terhadap kaum perempuan.
2. Adanya suatu dikotomi dalam peran masyarakat maupun peran domestik yang bermula dari stereotip-stereotip yang menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang hanya berkewajiban untuk mengelola berbagai kegiatan atau urusan rumah tangga. Pernyataan tersebut menjadi hal yang mengganggu pembagian fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara kaum laki-laki dan perempuan

dan menjadikan kaum perempuan hanya memiliki konsen dan dieksploitasi atas fungsi reproduktifnya.



Banyak tantangan yang dihadapi Perempuan untuk menjadi pemimpin, salah satunya masih banyak Perempuan yang tidak mendukung Perempuan. Perempuan belum yakin jika Perempuan bisa dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk mengubah kebijakan dan untuk membuat kebijakan baru yang pro Perempuan, Perempuan perlu terlibat di dalamnya, sudah waktunya Perempuan mendukung pemimpin Perempuan. Sudah waktunya Perempuan percaya jika Perempuan bisa dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin.

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat untuk membangun desa. Namun demikian, upaya tersebut masih mengalami kendala terutama pada identifikasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, lebih – lebih kelompok masyarakat rentan desa, yang tidak memiliki daya dan relasi secara kuat dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Kelompok rentan dapat dikatakan hampir tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah desa. Mereka mengalami hambatan dalam berekspresi, bersuara, dan mengajukan pendapat atas hal – hal yang dialami mereka, mereka terlihat tidak berdaya di lingkungan besar masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa

Kelompok ini masih jarang dilibatkan dalam perumusan keputusan di desa. Karena seringkali dibelenggu oleh stigma bahwa tidak mampu untuk terlibat dalam perumusan keputusan. Perempuan dianggap hanya melakukan pekerjaan domestik, sehingga tidak dilibatkan dalam perumusan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), begitu juga dengan kelompok rentan lainnya.

Sulit untuk melihat dan mengetahui yang menjadi kebutuhan kelompok rentan karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan pembangunan di desa. Yang terlihat hanya kebutuhan mereka-mereka yang hadir dan berani menyuarakan usulan mereka.

Mereka yang termasuk kelompok rentan memiliki hak yang sama dalam pembangunan di desa, mereka memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan usulan yang merupakan kebutuhan mereka untuk dirumuskan ke dalam rencana pembangunan di desa,

Ketidakberdayaan ini, membuat kelompok rentan kurang paham keberadaan dan situasi mereka di lingkungan sekitar. Ketidak pahaman tersebut membuat mereka cenderung menerima begitu saja kondisinya, karena menjadi dianggap lumrah saja terjadi adanya. Selama ini kelompok rentan tidak terlihat oleh pemerintah desa, oleh karena itu keputusan pembangunan desa yang diambil seringkali mengabaikan keberadaan kaum marginal. Hal ini membuat kelompok rentan tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan desa.

Saat ini Indonesia sedang dalam proses untuk menuju inklusi di tahun 2030, artinya Indonesia melibatkan setiap elemen masyarakat dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan, termasuk kelompok rentan. Kegiatan ini dimulai dari desa, karena desa adalah kerajaan terkecil dalam sebuah negara. Sehingga Desa Inklusif menjadi program nasional yang hangat dalam beberapa tahun ke depan sampai tercapainya tujuan desa inklusif di tahun 2030.

Desa inklusif adalah desa yang merangkul semua warganya tanpa terkecuali, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Desa inklusif juga

merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Ciri-ciri desa inklusif, antara lain:

1. Menghargai perbedaan
2. Tersedia data disabilitas komprehensif
3. Memenuhi hak-hak dasar warga desa
4. Terbangun perspektif disabilitas
5. Regulasi desa yang berperspektif disabilitas
6. Perlindungan sosial disabilitas
7. Lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung
8. Aksesibilitas yang baik

Ada Sembilan indikator Desa Inklusif, yaitu:

1. Membangun perspektif disabilitas dan inklusi sosial;
2. Data disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi;
3. Pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal;
4. Melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan;
5. Perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas;

6. Pembentukan peraturan/regulasi desa yang inklusif;
7. Membangun aksesibilitas infrastruktur;
8. Membangun sistem informasi; dan
9. Mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif (sumber: Salim et al., 2020).

Pengembangan desa inklusif dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan warga desa, dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang inklusif.

Untuk mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat di desa, pemerintah desa perlu membuat peraturan di desa. Peraturan Desa ini sebagai landasan hukum yang jelas dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perdes merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa membuat perdes untuk melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai pemerintah dan penyelenggara negara di tingkat desa. Di antara kewajiban pemerintah desa adalah pemenuhan hak dan perlindungan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, odhiv, dan korban konflik agraria. Secara umum, kelompok rentan selama ini masih terabaikan di desa. Tidak hanya diabaikan, mereka juga mendapatkan diskriminasi dan kekerasan karena stigma dan *stereotype* di masyarakat.

Dengan terbentuknya sebuah perdes, Pemerintahan desa dapat mengembangkan pembangunan yang inklusif, yakni pembangunan yang terbuka, melibatkan, dan merangkul semua kelompok sosial yang selama ini disebut sebagai kelompok rentan. Dimana desa-desa khususnya di wilayah dampingan Yayasan Ate

Keleng (YAK) di kabupaten Karo dan Deli Serdang, fenomena kelompok marginal dan rentan tersebut masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Secara umum alokasi dana desa masih kurang memberikan ruang, perhatian atau apresiasi kepada kelompok marginal dan rentan dalam mengembangkan potensi diri dan mendapatkan haknya sebagai warganegara yang memiliki hak sama dengan orang banyak secara umum. Disamping itu, pemerintahan desa juga diharapkan akan mengakui bahwa semua elemen masyarakat di desanya akan diakui dan mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan di desa.

Pembentukan peraturan atau regulasi yang inklusif adalah upaya untuk menuju Desa Inklusif, dan merupakan salah satu indikator Desa Inklusif. Dengan adanya Perdes Desa Inklusif maka pemerintah desa mempunyai kerangka hukum dan kebijakan untuk membangun Desa Inklusif. Melalui Perdes yang bersifat inklusif, pemerintah mulai mengubah pandangan terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan, yang sebelumnya dipandang rendah dan dianggap sebagai beban masyarakat. Perdes juga membuka ruang dan melibatkan kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan di desa.

(sumber; <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perdes-desa-inklusif>).

Pembentukan peraturan atau regulasi yang inklusif adalah upaya untuk menuju Desa Inklusif, dan merupakan salah satu indikator Desa Inklusif. Dengan adanya Perdes Desa Inklusif maka pemerintah desa mempunyai kerangka hukum dan kebijakan untuk membangun Desa Inklusif. Melalui Perdes Desa Inklusif, pemerintah

mulai mengubah pandangan terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan, yang sebelumnya dipandang rendah dan dianggap sebagai beban masyarakat. Perdes juga membuka ruang dan melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan.

Peraturan desa mengatur beberapa hal yang sangat prinsip di tingkat desa terkait dengan kelompok marginal dan rentan. Dalam hal ini peraturan desa yang dimaksud adalah peraturan desa yang bersifat inklusif.

Peraturan Desa yang bersifat Inklusif mengatur hal-hal yang paling mendasar kelompok marginal dan rentan yang merupakan HAM. Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas di dalam perdes, akan memberikan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Pasalnya, selama ini di tingkat desa, Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang jumlahnya cukup signifikan, namun perhatian dan pelibatan mereka dalam pembangunan di desa sangat minimal.

Yayasan Ate Keleng/ PARPEM GBKP melalui Divisi PPMD (Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melakukan pelatihan pembuatan peraturan desa yang partisipatif dan inklusif. Adapun hasil dari pelatihan ini adalah ada satu draft peraturan desa dengan judul “Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Di Desa”. Tujuan dari adanya draft ini adalah kelompok dampingan YAK/ PARPEM GBKP, khususnya yang merupakan kelompok target Divisi PPMD yang menjadi peserta

pelatihan mengesahkan peraturan desa ini untuk kesejahteraan penyandang disabilitas di desa mereka. Peraturan Desa ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa untuk membuat program untuk penyandang disabilitas.



YAK/PAK/PEM
Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

”Hari Pohon Sedunia ‘Hutan dan Inovasi”

Sriulina Br Sembiring S.Tr.P

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kata kunci dari definisi tersebut adalah manusia memiliki peran strategis untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan hanya kepentingan saat ini saja, dalam arti yang lebih luas, lingkungan adalah modal untuk keberlangsungan kehidupan.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang menutupi sebagian besar wilayah. Luas hutan Indonesia menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Meskipun luas hutan di Indonesia masih cukup besar, namun terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penurunan luas hutan di Indonesia. Penebangan liar, konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta kebakaran hutan menjadi faktor utama yang menyebabkan berkurangnya luas hutan di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya luas hutan Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat dari faktor-faktor tersebut.



Sebagai pengingat bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat pohon bagi kehidupan, terutama dalam rangka melestarikan lingkungan maka pada tanggal 21 November ditetapkan sebagai 'Hari Pohon Sedunia'. Sejarah Hari Pohon Sedunia dicetuskan oleh Julius Sterling Morton, seorang pencinta alam dari Amerika Serikat. Pada tahun 1854, Julius bersama dengan istrinya pindah dari Michigan ke Nebraska (wilayah yang baru terbentuk dan tidak ada pepohonan). Kondisi tersebut mendorong Julius untuk memberdayakan Masyarakat agar mau menanam pohon agar melestarikan dan memperindah tempat tinggalnya. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 1872, Julius mengusulkan satu hari salam setahun untuk menanam pohon yang kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagai Hari Pohon Sedunia pada tanggal 21 November. Perayaan ini pertama kali diselenggarakan di Spanyol.

Tema Hutan dan Inovasi sebagai penyanggah dan pengingat bagi kita bahwa ada solusi baru untuk dunia dengan menyoroti peran penting dari inovasi dan teknologi dalam melindungi hutan melalui system pemantauan canggih yang melacak deforestasi hingga praktik hutan berkelanjutan, inovasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang saat ini mengancam hutan kita.

Istilah 'Hutan' tentu tidak asing, apa yang terlintas dipikiran kita jika mendengar kata itu. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dapat disimpulkan bahwa hutan adalah area luast yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lain serta komponen biotik dan abiotik yang menyokong ekosistem hutan melalui interaksi satu dengan lainnya yang berada dalam keseimbangan yang bersifat dinamis. Hutan atau lebih spesifiknya pohon memiliki manfaat yang besar jika dilestarikan contohnya, menghasilkan oksigen, menyimpan cadangan air, mencegah banjir, mengurangi dampak erosi tanah dan longsor serta menjadi tempat tinggal flora dan fauna.



Namun saat ini, sangat banyak berita yang beredar bahwa banyak pohon yang ditebang secara liar sehingga kelestarian hutan tidak terjaga lagi dan luas hutan semakin berkurang. Menurut buku '*Nasib Hutan Indonesia Diujung Tanduk*', deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka jangan heran jika bencana alam terus terjadi saat ini. Baik itu, banjir, longsor bahkan perubahan iklim yang semakin memanas.

Melalui Divisi Lingkungan Hidup Terkait Perubahan Iklim dan Pengelolaan Sampah dan Limbah, Yayasan Ate Keleng (YAK) kembali mengingatkan Masyarakat khususnya dampingan YAK untuk tetap menjaga dan melestarikan Hutan, sebab hutan adalah nafas manusia bahkan paru-paru dunia. Peringatan Hari Pohon Sedunia

dilaksanakan di salah satu desa dampingan YAK yaitu Desa Durin Serugun lebih tepatnya di kawasan hutan milik Kelompok Tani Hutan Derek Permai. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah desa, anggota KTH Derek Permai dan Mahasiswa KKN UNIMED. Penanaman diawali dengan ibadah sebagai harapan agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Kegiatan dilanjutkan dengan menanam 100 pohon, yaitu 50 batang durian dan 50 batang alpukat. Melalui kegiatan tersebut YAK berharap agar meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan mekestarikan hutan yang ada di desa mereka masing-masing.



YAK/PARPEM
Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

”Kursus Hak Asasi Manusia Untuk Pembela HAM”

Vionna Clarissa Br Ginting, S.H

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperingati pada setiap tanggal 10 Desember merupakan bukti bagaimana dunia memaknai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap orang seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk beragama, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan keamanan maupun hak dasar lainnya.

Hak Asasi Manusia sendiri bukan hanya menjadi perhatian Indonesia saja, melainkan seluruh bagian di dunia merasa pemenuhan hak-hak dasar manusia sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pada awalnya pengenalan mengenai HAM yang dikenal di Indonesia merupakan sebuah adopsi dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan



Semua lapisan masyarakat wajib mengetahui makna HAM karena semua masyarakat merupakan objek yang dikenai hak-hak tersebut dan subjek yang menerapkan hak-hak tersebut bagi orang lain. Namun tidak dapat dipungkiri pemenuhan hak-hak dasar sering kali disepelekan, maka dari itu dirasa perlu adanya orang-orang yang sangat *concern* terhadap pemenuhan hak-hak dirinya dan orang lain disekitarnya.

Dalam pemenuhan hak-hak asasi sering kita dengar mengenai Pembela HAM. Pembela HAM menurut Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 6 Tahun 2021 adalah “sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik

secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.”

Dilihat dari pemaknaan mengenai Pembela HAM, kerja-kerja Yayasan Ate Keleng juga sudah merupakan termasuk dalam individu atau kelompok Pembela HAM. Kursus yang diikuti oleh Lembaga yang sama-sama berkegiatan dalam memperhatikan agar setiap masyarakat untuk mendapat haknya merupakan jalan untuk dibukanya diskusi yang menarik. Sama-sama merasakan keprihatinan terhadap masyarakat yang haknya direnggut oleh individu atau kelompok yang tidak mengindahkan pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi perhatian utama bagi lembaga yang hadir. Sebagian besar peserta yang hadir merupakan lembaga-lembaga yang membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya kembali yang sudah direnggut oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil sumber kehidupan mereka seperti lahan yang ditanami oleh masyarakat sehingga mengakibatkan keberlangsungan kehidupan mereka terancam.



Mengambil lahan yang menjadi ladang pencarian untuk memenuhi kehidupan mereka maupun tanah yang merupakan warisan leluhur mereka mengakibatkan luka yang mendalam bagi masyarakat, lahan yang digunakan untuk bertahan hidup harus diambil sepihak oleh Perusahaan jahat. Lahan yang dipertahankan oleh mereka sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang mereka diambil paksa untuk dijadikan ladang bisnis, hidup mereka seperti hancur seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kami lakukan?, terus mereka tanyakan hingga akhirnya mereka merasa “kami perlu bantuan”. Dengan adanya adanya ini menimbulkan tumbuhnya jiwa-jiwa seseorang atau lembaga untuk membantu masyarakat memperoleh kembali hak yang memang milik masyarakat. Lalu apakah bentuk perlawanan terhadap perusahaan ini berjalan dengan damai dan lancar? Sudah dipastikan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk masyarakat bisa menang. Lalu apakah perjuangan ini berjalan dengan aman? Ancaman-ancaman sudah pasti terus dirasakan masyarakat tidak terkecuali pembela HAM.

Saling bertukar cerita dan diskusi mengenai ancaman-ancaman yang diterima saat pendampingan masyarakat yang berkonflik menimbulkan bahwa “kami” sebagai Pembela HAM juga perlu dilindungi. Belum adanya aturan atau Undang-Undang yang secara khusus menjadi landasan perlindungan Pembela HAM mengakibatkan bahwa kita sebagai pembela HAM harus menguatkan diri untuk menjadi benteng perlindungan bagi diri sendiri. Dalam pendampingan masyarakat sering kali kita dihadapkan pada masyarakat yang bertumpu pada pendamping untuk menjadi garda terdepan padahal seharusnya kita menjadi orang dibalik layar yang membantu mereka dari belakang. Pembela HAM harus dapat menjadi penenang bagi masyarakat agar perjuangan tetap berlanjut.



Dalam kursus ini juga menjadi media untuk bertukar pikiran bagaimana lembaga-lembaga lain melindungi diri mereka dalam

proses pendampingan masyarakat yang kerap kali mendapat ancaman dari luar. Bagaimana lembaga lain menerapkan SOP bagi Pembela HAM yang terjun langsung ke lapangan daerah konflik. Banyak hal yang di dapat mulai dari setiap Pembela HAM diharapkan memiliki dasar-dasar bela diri, lembaga yang harus memiliki tingkat keamanan terhadap data-data yang ada, adanya tempat yang dijadikan rumah aman bagi Pembela HAM, diusahakannya setiap berpergian tidak sendiri, penjagaan identitas hingga adanya fasilitas konseling bagi Pembela HAM yang menerima ancaman serta kekerasan dari pihak lawan.

Menjadi Pembela HAM bukanlah pekerjaan yang mudah, perlindungan hukum yang belum jelas mengakibatkan tidak adanya perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan keamanan HAM bagi pembela HAM namun perjuangan tidak boleh dihentikan. HIDUP RAKYAT!!!



”BERTANI SEHAT UNTUK BUMI KU SELAMAT”

Windi Karolina Yoanita Br Sitepu, SE

Pada zaman sekarang ini banyak sekali sakit penyakit yang menimpa makhluk hidup yang ada di bumi ini, mulai dari manusia, hewan bahkan tumbuhan. Tentu saja hal ini memiliki pemicu yang sangat jelas seperti :

1. Perubahan iklim
2. Perubahan cuaca
3. Perubahan Gaya Hidup (Bagi Manusia)
4. Punahnya musuh Alami (Bagi tanaman)

Bahkan lebih banyak lagi pemicu dari pada hal tersebut, yang dimana bisa dikatakan kitalah penyebab dari rusaknya bumi kita. Mulai dari penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan yang menyebabkan rusaknya lingkungan bahkan diri kita. Menariknya kita selalu tidak menyadari hal tersebut dan tidak ingin tahu dampak apa yang terjadi akibat dari perbuatan kita.

Penggunaan pupuk kimia telah menjadi praktik umum dalam industri pertanian selama beberapa dekade terakhir. Meskipun pupuk kimia secara signifikan mampu meningkatkan hasil produksi dalam waktu singkat, dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tidak dapat diabaikan. Adapun dampaknya adalah (*mertani.co.id*) :

1. Pencemaran Air

Salah satu dampak utama penggunaan pupuk kimia adalah pencemaran sumber daya air. Ketika pupuk kimia diaplikasikan secara berlebihan, unsur-unsur seperti nitrogen dan fosfor dapat larut dan mencemari air tanah serta air permukaan. Pencemaran ini dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di badan air, yang mengurangi kadar oksigen dan membahayakan kehidupan akuatik.

2. Degradasi Tanah

Pupuk kimia sering kali mengandung garam yang dapat menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Penggunaan berkelanjutan dapat menyebabkan penumpukan garam di tanah, mengakibatkan degradasi struktur tanah, penurunan kapasitas retensi air, dan hilangnya mikroorganisme tanah yang bermanfaat.

3. Emisi Gas Rumah Kaca

Produksi dan penggunaan pupuk nitrogen sintetis berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, terutama nitrous oxide (N_2O), yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida (CO_2). Ini memperburuk perubahan iklim dan berdampak negatif pada ekosistem global.

4. Kesehatan Manusia

Pencemaran air oleh nitrat dari pupuk kimia dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Konsumsi air yang terkontaminasi nitrat dapat menyebabkan kondisi kesehatan

seperti methemoglobinemia, yang terutama berbahaya bagi bayi. Selain itu Pestisida yang dipakai dalam jumlah berlebihan, dapat menimbulkan efek akut, dimana dapat terjadi mual, muntah, gangguan saluran cerna, sakit kepala. Dapat mengakibatkan gangguan seperti demensia atau pikun dan penyakit parkinson, dalam jangka panjang, selain itu dapat mengganggu kesuburan pria, menyebabkan kanker dan banyak lagi.

Dalam memperoleh hasil tanam yang optimal, kita juga harus menyadari serta menghindari timbulnya dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, beberapa alternatif yang ramah lingkungan dapat diterapkan, antara lain (mertani.co.id) :

1. Pupuk Organik

Pupuk organik, seperti kompos, pupuk kandang, dan sisa-sisa tanaman, merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pupuk organik membantu meningkatkan kesuburan tanah secara alami, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan.

2. Pupuk Hayati

Pupuk hayati mengandung mikroorganisme hidup yang dapat membantu tanaman menyerap nutrisi lebih efektif. Contoh pupuk hayati termasuk Rhizobium untuk leguminosa, Azospirillum, dan mikoriza. Penggunaan pupuk hayati dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kesehatan tanah.

3. Pertanian Terpadu (Integrated Farming)

Sistem pertanian terpadu menggabungkan berbagai teknik pertanian untuk menciptakan ekosistem yang seimbang. Ini termasuk rotasi tanaman, penggunaan penutup tanah, dan integrasi ternak dalam sistem pertanian. Pendekatan ini dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan meningkatkan keberlanjutan.

4. Pertanian Presisi

Teknologi pertanian presisi menggunakan data dan sensor untuk memantau dan mengelola input pertanian secara lebih efisien. Ini termasuk penggunaan drone dan sensor tanah untuk menentukan jumlah pupuk yang tepat yang diperlukan oleh tanaman, sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan mengadopsi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pupuk organik dan hayati, serta teknik pertanian berkelanjutan lainnya.

AYO BERTANI SEHAT UNTUK BUMI DAN KITA SELAMAT !!

Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

“Human Capital Theory (?)”

oleh: Yuni Sartika Ginting, SE.

Human Capital Theory atau lebih awam disebut **Teori Modal Manusia** merupakan pemikiran yang menganggap manusia sebagai modal atau barang modal, dan bahwa manusia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Teori ini berpendapat bahwa :

- Manusia dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitasnya melalui pendidikan dan pelatihan.
- Investasi dalam sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi dalam sarana fisik bisnis, seperti mesin atau teknologi.
- Pengalaman dapat diubah menjadi pengetahuan dan keterampilan

Berbeda dengan *Human resources* (HR) atau sumber daya manusia (SDM) adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja seperti:

- Perekrutan dan seleksi
- Pelatihan dan pengembangan
- Manajemen kinerja
- Penggajian dan manfaat

- Manajemen hubungan karyawan
- Kebijakan dan praktik kerja
- Kepatuhan undang-undang ketenagakerjaan

Modal Manusia atau *Human Capital* (HC) dalam Bahasa Indonesia adalah sebuah nilai ekonomi dari kemampuan dan kualitas tenaga kerja yang mempengaruhi produktivitas, termasuk pendidikan tinggi, pelatihan teknis di tempat kerja, kesehatan, dan nilai-nilai lainnya seperti ketepatan waktu. Beberapa contoh yang termasuk dalam *human capital* adalah keterampilan, pendidikan, kreativitas, kepribadian, pengalaman, kesehatan yang baik, dan karakter moral. *Human capital* artinya segenap keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang bisa diwujudkan dalam sebuah kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah layanan profesional dan nilai ekonomi.

Human Capital (HC) memandang karyawan perusahaan sebagai aset, dapat diperkaya dan bisa memberikan keuntungan sehingga HC akan berfokus terhadap pengembangan sumber daya manusia agar nilainya akan semakin bertambah sehingga bisa berkontribusi secara maksimal terhadap kegiatan produksi. Ini merupakan salah satu teori yang dibagikan ke kelompok *Credit Union* (CU) dampingan Yayasan Ate Keleng (YAK) GBKP.

Kelompok CU dampingan YAK GBKP secara umum memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Penasehat, Pengurus, Pengawas, Anggota sebagai pemilik saham dan bagi sebagian besar CU sudah memiliki Karyawan atau lebih sering disebut Juru Buku (untuk

saat ini). Operasional CU dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengurus, Pengawas dan Juru Buku setiap penabungan yang umumnya dilakukan sekali sebulan dan atau setiap minggu bagi beberapa CU. Teori Modal Manusia yang dimaksud sebelumnya ditujukan kepada peningkatan kapasitas/pengetahuan/keterampilan terhadap Pengurus, Pengawas dan karyawan CU melalui pendidikan, pelatihan, *exercise*, *study visit/tiru*, riset dan lain-lain. Sehingga kedepannya CU dapat melihat bahwa Pengurus, Pengawas dan Karyawan CU tersebut adalah asset yang berharga, yang tidak pernah bisa habis bahkan dapat diperkaya secara intelektual dan keterampilan, jika diorganisir dan diregenerasi dengan positif secara maksimal. Oleh karena itu anggota sebagai pemilik saham harus kritis dalam mendukung program-program CU yang dibuat oleh Pengurus CU.

Dengan demikian dimulai dari peningkatan nilai **“modal utama”** yakni Pengurus, Pengawas atau para Karyawan (jika CU sudah berbentuk managerial) yang merujuk pada kerja-kerja yang inovatif dan berdaya saing, diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif tidak hanya untuk keberlangsungan sebuah CU tetapi juga mewujudkan CU yang sehat, berkembang maju dan bermanfaat bagi anggotanya.

CU sehat, bersahabat dan bermanfaat.



“Seseorang yang banyak bertindak dan membaca, akan banyak melihat dan mengetahui.”